



PENETAPAN

Nomor 1213/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

SUPARNO Bin MESENU, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat kediaman di Glanggang Rt. 019 Rw. 006 Desa Slamet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1213/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 14 Desember 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon :

Nama	:	DINDA WULANDARI Binti SUPARNO;
Tanggal lahir	:	09 Juni 2001 (umur 15 tahun, 7 bulan);
Agama	:	Islam;
Tempat Kediaman di	:	Dusun Glanggang Rt. 19 Rw. 06 Desa Slamet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
Dengan calon suami	:	
Nama	:	JONI ADI CAHYONO Bin SUMARTO;
Umur	:	15/12/1992, (umur 24 tahun);
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas;
Tempat Kediaman di	:	Dusun Glanggang Rt. 20 Rw. 06 Desa Slamet Kecamatan Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;



2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Tanggal 13 Desember 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 2 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, yang berakibat saat ini anak kandung Pemohon sedang hamil 2 bulan akibat berhubungan dengan calon suaminya tersebut;
4. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (DINDA WULANDARI Binti SUPARNO) untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama (JONI ADI CAHYONO Bin SUMARTO);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau bila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;



Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu DINDA WULANDARI Binti SUPARNO, tanggal lahir 09 Juni 2001, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Glanggang Rt. 19 Rw. 06 Desa Slamet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 15 tahun, 7 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa saya sejak 2 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama JONI ADI CAHYONO Bin SUMARTO;
- Bahwa saya dan calon suaminya tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta saat ini saya sedang hamil 2 bulan;
- Bahwa saya dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan saya tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saya siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai seorang isteri;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama JONI ADI CAHYONO Bin SUMARTO, tanggal lahir 15/12/1992, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Dusun Glanggang Rt. 20 Rw. 06 Desa Slamet Kecamatan Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar saya ingin segera menikah dengan anak Pemohon (DINDA WULANDARI Binti SUPARNO), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa saya masih berstatus jejak dan sudah sejak 2 tahun yang lalu saya menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui kalau saat sekarang ini ini kondisi anak Pemohon sedang hamil 2 bulan;

halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



- Bahwa saat ini saya siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saya tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan dengan perempuan lain kecuali dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saya kini sedang bekerja sebagai seorang Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya siap menjadi seorang suami dan sanggup menjadi kepala keluarga nantinya;

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan keluarga calon suami anak Pemohon bernama SUMARTO Bin SUKADI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Glanggang Rt. 019 Rw. 006 Desa Slamet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah calon besan Pemohon atau keluarga calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama (Dinda Wulandari Binti Suparno) dengan anak saya bernama (Joni Adi Cahyono) namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 15 tahun, 7 bulan tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 2 tahun yang lalu, dan bahkan sudah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saya mengetahui kalau kondisi anak Pemohon saat ini sedang hamil 2 bulan hasil hubungannya dengan anak saya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;

halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anak saya;
- Bahwa saya mengetahui anak Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, dan mengawasi adiknya, sedangkan calon suami anak Pemohon saat ini sudah mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa saya sebagai keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak saya dengan anak Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Photokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3507162008750003 tanggal 11-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- b. Photokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : 567/61/XI/1993 tanggal 27 Nopember 1993 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- c. Photokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3507162708080074 tanggal 20-06-2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- d. Photokopi Ijazah atas nama anak Pemohon Nomor : DN-05 DI/06 0176949 tanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



- e. Asli surat pemberitahuan adanya halangan nikah atas nama anak Pemohon Nomor : B.1082/Kua.13.35.05/Pw.01/12/2016 tanggal 09 Desember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Asli surat penolakan pernikahan atas nama anak Pemohon Nomor : B.1086/Kua.13.35.05/Pw.01/12/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Sepupu Pemohon bernama IRWAN JADY Bin LAJI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Wringinagung RT. 26 RW. 09 Desa Slamet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, sebagai saksi di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama (Dinda Wulandari Binti Suparno) dengan (Joni Adi Cahyono Bin Sumarto) namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 15 tahun, 7 bulan tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 2 tahun yang lalu, dan bahkan sudah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saya mengetahui kalau kondisi anak Pemohon saat ini sedang hamil 2 bulan hasil hubungannya dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh calon suaminya;

halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



- Bahwa saya mengetahui anak Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, dan mengawasi adiknya, sedangkan calon suami anak Pemohon saat ini sudah mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai Buruh Harian Lepas;

- Bahwa saya sebagai keluarga Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Tetangga calon suami anak Pemohon bernama LIA FATIMAH Binti KASNO, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat kediaman di Dusun Wringinanom RT. 26 RW. 09 Desa Slamet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, sebagai saksi di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saya mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama (Dinda Wulandari Binti Suparno) dengan (Joni Adi Cahyono Bin Sumarto) namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 15 tahun, 7 bulan tahun;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 2 tahun yang lalu, dan bahkan sudah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;

- Bahwa saya mengetahui kalau kondisi anak Pemohon saat ini sedang hamil 2 bulan hasil hubungannya dengan calon suaminya;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;

- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh calon suaminya;

- Bahwa saya mengetahui anak Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak dan mengurus rumah tangga, sedangkan calon suami anak Pemohon saat ini sudah mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp.

halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai Buruh Harian Lepas;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umum, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon mempelai laki-laki yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon mempelai perempuan tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5 dan P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 adalah Photokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa P.2, P.3 dan P.4 adalah Photokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, atas nama Pemohon dan Ijazah atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak yang bernama DINDA WULANDARI Binti SUPARNO, yang saat ini masih berusia 15 tahun, 7 bulan;

Menimbang, bahwa P.5 dan P.6 adalah asli surat keterangan adanya halangan nikah dan asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

yang memberi bukti bahwa bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 16 tahun;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan orangtua calon suami anak Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Dinda Wulandari Binti Suparno, umur 15 tahun, 7 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Joni Adi Cahyono Bin Sumarto sejak 2 tahun yang lalu bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;

halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi isteri sebagaimana kebiasaannya yang sering membantu dalam mengurus rumah tangga dan calon suami anak Pemohon juga telah siap menjadi suami karena telah bekerja sebagai seorang tani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 16 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 16 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang



mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 16 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 16 tahun tapi sudah “mukallaf”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 16 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah mukallaf sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang dharury, yakni dengan hamilnya anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung anak Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat

halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Majelis Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تتنج البهيمة بجماعة هل تحسبون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : “Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur’an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Arrum ayat 30), (HR. Bukhari).

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Menimbang bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim perlu menyetujui qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama DINDA WULANDARI Binti SUPARNO untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama JONI ADI CAHYONO Bin SUMARTO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. AHMAD SYAUKANI S.H.M.H, sebagai Ketua Majelis, H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.E.S. dan Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.E.S., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh AIMATUS SYAIDAH, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.E.S.
Hakim Anggota II,

Drs. AHMAD SYAUKANI S.H.M.H

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



AIMATUS SYAIDAH, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)